KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-2012
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (SEDANG / BERAT)**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897) 2. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai diLingkungan KementerianHukum dan HAM 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932). 5. Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912)	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer 2. Mengetahuai Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Mengetahuai Proses Penyusunan Program 4. Mengetahuai Aturan dan Regulasi Penuyusunan Program
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin 2. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Rapat
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka Penjatuhan Hukum Disiplin Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (SEDANG / BERAT)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDINATOR	JFT/JFU	TIM PEMERIKSA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Kabag TUU untuk membentuk tim pemeriksa dan menyiapkan konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa	Mulai					Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai	5 Menit	Surat disposisi	
2.	Memberikan Arahan Koordinator Kepegawaian untuk membuatkan konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	5 Menit	Surat disposisi	
3.	Berkoordinasi untuk membuat dan Menyusun konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag TUU	5 Menit	Surat disposisi	
4.	Menyusun Konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa						Surat yang telah disposisi	1 Jam	Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim	
5.	Mengkoreksi konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa untuk diserahkan kepada kabag TUU			Tidak / Ya			1. Surat yang telah disposisi 2. Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim	10 Menit	Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim yang telah dikoreksi	
6.	Memeriksa dan Mengkoreksi konsep surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa untuk diserahkan kepada Kakanwil		Tidak / Ya				Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim	10 Menit	Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim yang telah dikoreksi	
7.	Menyetujui Surat keputusan Pembentukan Tim pemeriksa						Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim	10 Menit	Surat Keputusan Pembentukan Tim	
8.	Tim Pemeriksa menerima Surat Perintah melakukan pemeriksaan						Surat Keputusan Pembentukan Tim	2 Jam	Konsep Surat Pemanggilan Pegawai terkait	
9.	Ketua Tim Pemeriksa membuat surat pemanggilan pemeriksaan terhadap pegawai terkait						Konsep Surat Pemanggilan Pegawai terkait	2 Hari	Surat Pemanggilan Pegawai terkait	
10.	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pegawai terkait serta membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa dan Menyusun Laporan untuk disampaikan Kepada Kakanwil						1. Konsep Surat Pemanggilan Pegawai terkait. 2. Konsep Berita Acara dan LHP	1 Hari	1. Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Konsep Surat Rekomendasi Hukdis	
11.	Kepala Kantor Wilayah Mengirimkan Rekomendasi serta menyerahkan kepada Tim Pemeriksa terkait Penjatuhan Disiplin secara berjenjang sesuai Aturan yang berlaku.	Selesai					1. Berita Acara dan LHP 2. Konsep Surat Rekomendasi hukdis	2 Jam	Surat Rekomendasi Penjatuhan Hukdis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Ka.UPT maupun atasan langsung	